

# Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Generasi Z Pada Pemilu 2024 di MAN 3 Bantul: Studi Kasus Peserta didik Pesantren dan Non Pesantren

Mar'atus Sholikhah<sup>a,1</sup>, Nasiwan<sup>b,2</sup>

<sup>1</sup> [maratus9fis.2020@student.uny.ac.id](mailto:maratus9fis.2020@student.uny.ac.id) Mahasiswa Departemen PKnH, Fishipol, UNY

<sup>2</sup> [nasiwan@uny.ac.id](mailto:nasiwan@uny.ac.id) Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik, UNY

<sup>a</sup> Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

<sup>b</sup> Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

## ABSTRAK

Artikel ini berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik generasi Z di MAN 3 Bantul dalam perspektif peserta didik pesantren dan non pesantren. Data Dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan proses habituasi efikasi politik melalui kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga politik. Adapun pendidikan politik berperan dalam pelajaran melalui enam pendekatan dan berbagai cara yaitu integrasi pendidikan Pancasila melalui pendekatan interaktif, melatih keterampilan analisis kritis, menghubungkan materi dengan isu-isu aktual, dan mengadakan kampanye pendidikan politik. Pendidikan politik di MAN 3 Bantul sudah berjalan dengan baik, namun perlu adanya inovasi yang relevan dengan kondisi peserta didik pesantren yang terkendala dalam pengadaan alat komunikasi. Adapun upaya dalam mengatasi kendala peserta didik yaitu dengan meningkatkan fasilitas dan sumber daya pendukung lingkungan madrasah.

## ABSTRACT

*This article is based on research that aims to describe the role of Political Education on the Political Participation of Generation Z in MAN 3 Bantul from the perspective of pesantren and non-pesantren students. Data was collected through observation, interview, and documentation techniques. The results of the study show the habituation process of political efficacy through extracurricular activities, intracurriculars, and cooperation with political institutions. Political education plays a role in learning through six approaches and various ways, namely the integration of Pancasila education through an interactive approach, training critical analysis skills, connecting material with actual issues, and holding political education campaigns. Political education at MAN 3 Bantul has been running well, but there needs to be innovations that are relevant to the condition of pesantren students who are constrained in the procurement of communication equipment. The effort to overcome the obstacles of students is to improve facilities and resources to support the madrasah environment.*

## Sejarah Artikel

Diterima : 30 Juli 2024

Disetujui: 30 Juli 2024

## Kata kunci:

Pendidikan Politik, partisipasi politik, generasi Z

## Keywords:

Political Education, political participation, generation Z

## Pendahuluan

Negara Indonesia menganut ideologi Pancasila yang memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan bangsa dan negara. Secara khusus, dalam sila ke empat Pancasila menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi baik secara formal maupun informal. Dalam demokrasi, kekuasaan terbesar bukan terletak pada negara atau pemerintahannya akan tetapi pada warga negaranya. Dalam konteks tersebut kekuasaan berarti berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat melalui wakil-wakil atau utusannya, rakyat menjalankan melalui wakil atau kuasanya, dan semua fungsi menjalankan kekuasaan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat (Gaffar, 2013, p.61). Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi sebagai bentuk pemerintahan memerlukan partisipasi dari warga negara yang mana warga negara merupakan sumber kehidupan demokrasi (Toerell, 2006). Sila keempat Pancasila, Pasal 1 Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dan pemilihan umum adalah cara untuk menerapkan sistem demokrasi. Pemilu yang demokratis hanya dapat dilakukan jika seluruh tahapan pemilu bersifat demokratis, selain itu partisipasi dalam pemilu juga dapat menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan kata lain, semakin tinggi jumlah pemilih maka semakin baik pula proses pemilunya. Begitupun sebaliknya, semakin rendah partisipasi pemilih maka semakin buruk proses pemilunya.

Rendahnya partisipasi politik menjadi suatu permasalahan yang semakin meningkat dan akan diperhatikan oleh berbagai pihak baik lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintahan, dan penyelenggara pemilu. Penurunan kepercayaan masyarakat dipicu oleh berbagai faktor seperti banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh wakil rakyat dan banyaknya janji-janji pada saat kampanye yang tidak dilaksanakan dengan baik. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai permasalahan politik menyebabkan partisipasi politik semakin rendah serta masih terdapat masyarakat yang menganggap bahwa demokrasi tidak mengubah kualitas hidup warga negara dan menganggap bahwa urusan politik bukanlah urusan mereka, akan tetapi urusan pemerintahan yang dianggap memperjuangkan nasib sendiri bukan rakyat. Yanuarti (2016) mengemukakan bahwa ketika kekecawaan terhadap realitas politik meningkat, maka sikap apatis terhadap politik akan muncul. Dan dari riset yang dilakukan oleh KPU dikatakan bahwa masyarakat, termasuk generasi muda kurang yakin terhadap demokratisasi Indonesia di masa depan dan sebagian dari generasi muda merasa partai politik atau politisi tidak mewakili masyarakat dengan baik.

Setiap warga dan penduduk negara dewasa memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum, terlebih pada tahun ini saatnya generasi Z dan pemilih pemula ikut andil dalam pesta demokrasi tahun 2024. Dikutip dari Databoks.com, diperoleh data yang ditetapkan oleh KPU yang menunjukkan bahwa pemilihan umum pada tahun 2024 berjumlah 204.807.222 pemilih dan 33,6% dari jumlah pemilih adalah generasi Z. Kemudian Komisi Umum (KPU) daerah Bantul mencatat pemilih pemula generasi Z pada Pemilihan Umum 2024 sebanyak 110.743 pemilih. Pada faktanya, pemilih pemula cenderung memiliki antusias yang tinggi, relatif lebih rasional namun keputusan pilihan yang diambil belum bulat. Perbedaan dari pemilih pemula dan pemilih lainnya yaitu terdapat pada pengalaman politik yang diperoleh selama pemilu sehingga pengambilan keputusan dapat berubah sesuai dengan informasi yang didapatkan. Bahkan pemilih pemula mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu seperti kerabat, saudara dekat, bahkan keluarga dan teman. Generasi Z lahir bersama dengan teknologi yang semakin pesat dan hal tersebut dapat mempengaruhi pada penentuan pilihan pemilih pemula yang cenderung memiliki kebiasaan yang bebas, santai serta menyukai sesuatu hal yang menyenangkan dan mudah terintervensi oleh *publik figur* yang mereka sukai. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyampaikan bahwa rintangan saat ini adalah meningkatkan partisipasi politik bagi remaja dan anak-anak.

Perlunya upaya berkelanjutan yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman politik warga negara Indonesia dan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk generasi muda melalui pendidikan politik dan pendidikan demokrasi. Pendidikan politik dinilai sangat penting bagi tumbuhnya warga negara yang mempunyai pemahaman politik, kesadaran, dan partisipasi politik di Indonesia. Pendidikan demokrasi dalam arti yang lebih kongkrit dapat dipahami sebagai upaya sadar untuk mengubah proses sosialisasi demokrasi di masyarakat dengan sedemikian rupa sehingga seseorang benar-benar memahami sistem demokrasi ideal yang hendak diwujudkan (Nasiwan, 2004,p.6). Menurut Kartono (2009), pendidikan politik merupakan cara dalam meningkatkan pemahaman politik dan partisipasi rakyat secara maksimal sesuai dengan paham demokrasi. Pendidikan politik juga mengajarkan warga negara bahwa transmisi nilai dan norma tetap tetap terjadi meskipun mereka tidak bergabung dalam partai politik (Lestari, 2017, pp.133-134).

Menurut Amril (2004) dalam (Nasiwan.2023, p.15) mengemukakan bahwa pendidikan politik bertujuan untuk (1) mengajarkan generasi muda dan orang dewasa untuk menjadi warga negara yang baik, terutama dalam fungsi sosial dan politik, (2) menumbuhkan hati nurani politik, rasa etika politik, dan tanggung jawab politik, (3) memperoleh pemahaman yang kritis tentang hubungan politik di lingkungan sekitar, (4) membangun kemampuan untuk menganalisis konflik yang sedang terjadi, dan (5) memfasilitasi partisipasi melalui refleksi yang konstruktif terhadap hal-hal yang telah dilakukan.

Pendidikan politik sebagaimana halnya dunia pendidikan yang memiliki kekuatan strategis dalam perjalanan kehidupan politik suatu bangsa (Nasiwan.2023,p.3). Sekolah adalah institusi strategis dalam pemberian pendidikan politik warga negara. Sekolah diharapkan dapat membekali generasi muda dengan pemahaman yang baik tentang politik, sistem politik, serta hak dan kewajiban warga negara. Madrasah Aliyah Negeri 3 Bantul sebagai salah satu lembaga pendidikan islam yang memiliki fenomena yang berbeda dengan sekolah lainnya yaitu peserta didik yang hampir 55% berasal dari pondok pesantren berbeda-beda. Madrasah memiliki peserta didik berjumlah 683 dan sekitar 350 peserta didik telah mengikuti Pemilihan Umum tahun 2024. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti ingin mengetahui proses habituasi efikasi politik di MAN 3 Bantul yang memiliki fenomena yang berbeda dengan sekolah lainnya.

## Metode

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2024 di Madrasah Aliyah Negeri 3 Bantul yang terletak di Jl. Imogiri Timu, Km 10, Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek penelitian dilakukan berdasarkan teknik *purposive* sehingga menghasilkan seseorang yang memiliki keterlibatan dan pengetahuan lebih terhadap fenomena di MAN 3 Bantul yaitu kepala sekolah, guru Pendidikan Pancasila, guru ekstrakurikuler, dan peserta didik. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terhimpun kemudian dilakukan analisis keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik dan dilakukan analisis data menggunakan model Miles *and* Huberman yang terdiri dari reduksi data, unitasi atau kategori data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

Madrasah Aliyah Negeri 3 Bantul menjadi sekolah favorit berkarakter islami yang memiliki fenomena yang membedakan dengan sekolah lain dimana hampir 55% peserta didik berasal dari pondok pesantren yang berbeda-beda dengan ciri khas masing-masing. Madrasah dapat mengabungkan pendidikan formal dan keagamaan dengan baik, adapun peran pendidikan politik di MAN 3 Bantul pada partisipasi politik dan pemahaman politik peserta didik meliputi implementasi mata pelajaran Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan politik dalam perencanaan proses pembelajaran serta diberikan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, organisasi intra madrasah yang dapat memberikan bekal bagi peserta didik dalam menunjang PEMILU 2024. Dengan demikian, di bawah ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian terkait peran pendidikan politik terhadap partisipasi politik generasi Z pada PEMILU 2024 di MAN 3 Bantul: studi kasus peserta didik pesantren dan non pesantren.

### 1. Proses Habituasi Efikasi Politik Pada Pemilu di MAN 3 Bantul

Pendidikan politik merupakan salah satu pendidikan bagi seseorang dengan tujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki kebebasan otonom (Lestari, 2017). Sedangkan menurut (Nasiwan, 2023.p.14) pendidikan politik merupakan pembinaan dengan sengaja dan terstruktur dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman berpolitik serta diharapkan mempunyai rasa cinta serta ketertarikan yang besar kepada bangsa dan bernegara dan menghormati prinsip-prinsip yang digunakan dalam sistem politik untuk berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan politik dan memikul

tanggung jawab. Berdasarkan pasal 1 ayat 22 No. 10 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pemilih merupakan warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah. Menurut Basuki Rachmat dan Esther (2016.p.27) dalam Beniman, dkk (2022) pemilih pemula terbagi menjadi tiga kategori yaitu pemilih rasional, pemilih kritis emosional, dan pemilih pemula. Pemilih pemula dan generasi z menjadi generasi yang paling berpengaruh pada pemilu 2024 (sinamora, *et.al.* 2024). Dimana generasi z merupakan pemilih pemula terbesar mayoritas dengan rentang usia 17-29 tahun dan dikarenakan populasinya yang besar, suara dan preferensi mereka dapat menentukan hasil suara pada pemilu. MAN 3 Bantul sebagai lembaga sekolah memiliki peserta didik pada umumnya berkisar 16-19 tahun, dan berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terdapat 50% peserta didik di MAN 3 Bantul yang dikategorikan sebagai pemilih pemula yang baru pertama kali berpartisipasi politik.

Bentuk pendidikan politik di lembaga pendidikan seperti sekolah pada umumnya disampaikan melalui kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler (Nasiwan, 2023.p.130). Kavangh (1998) dalam (Nasiwan, 2023.p.55) mengemukakan dua metode sosialisasi pendidikan politik yaitu (a) metode yang tersembunyi dimana sosialisasi terjadi di lingkungan sosial non-politik seperti lingkungan keluarga, tempat kerja, lingkungan sosial dan keagamaan, serta lingkungan sekolah atau universitas; atau (b) bentuk dan proses yang terbuka di mana kegiatan terjadi di lembaga politik tertentu. Dari uraian diatas, MAN 3 Bantul memberikan pendidikan politik kepada peserta didik melalui kegiatan sosialisasi yang disampaikan melalui mata pelajaran dan kegiatan luar. Dan dari jenisnya, proses sosialisasi yang dilakukan masuk kedalam jenis yang pertama dimana lembaga sekolah yang melakukan proses sosialisasinya. MAN 3 Bantul hanya menggandeng KPU, namun tidak diminta untuk memberikan sosialisasi atau seminar kepada peserta didik terkait kesadaran pada PEMILU 2024.

Ekstrakurikuler di Madrasah Aliyah Negeri 3 Bantul dijadikan sebagai pendidikan politik untuk peserta didik. Kegiatan tersebut melalui Organisasi Intra Madrasah (OSIM) yang direalisasikan melalui pemilihan ketua OSIM. Dari kegiatan tersebut, peserta didik akan diajarkan proses dalam pemilihan umum yang sebenarnya yaitu dimulai dengan pemilihan calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIM melalui prosedur yang telah ditentukan, sesi penyampaian visi misi, debat, kampanye, dan dilakukan pemilihan ketua OSIM dengan selayaknya pemilu. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 39 Tahun 2008 mengenai pembinaan kesiswaan, kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu jalur pembinaan kesiswaan yang diikuti dan dilaksanakan oleh siswa baik di sekolah maupun luar sekolah dengan tujuan memperkaya dan memperluas diri peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler madrasah selain OSIM, terdapat kegiatan podcast dan tontipaskibraka yang menjadi upaya pemberian pendidikan politik. Wilbrath dalam (Maran, 2007) menyampai bahwa salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi politik yaitu penerimaan rangsangan politik. Hal tersebut dapat muncul dari diskusi politik di media massa, baik formal maupun informal, maupun melalui media sosial.

Madrasah Aliyah Negeri 3 Bantul menggandeng KPU dalam kegiatan pemberian pendidikan politik, dimana madrasah memiliki program yang akan dilaksanakan pada semester selanjutnya yaitu mendatangkan pihak KPU Bantul untuk memberikan sosialisasi terkait pemilih pemula dan pentingnya partisipasi dalam kegiatan politik. Hal tersebut sejalan dengan (Nasiwan, 2023. P.58) yang mengatakan bahwa KPU juga bertanggung jawab untuk mengajarkan pemilih, terutama pemilih pemula, tentang dan pengalaman dalam kegiatan pemilu. Selain itu, KPU juga memiliki program KPU goes to school, KPU goes to campus, dan kursus kepemiluan dimana hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh lembaga sekolah sebagai upaya untuk memberikan pemahaman melalui kegiatan sosialisasi dari pihak KPU. Madrasah Aliyah Negeri 3 Bantul menyadari terkait kepentingan kesadaran dan partisipasi politik peserta didik, sehingga akan hal tersebut MAN 3 Bantul meyakini bahwa seluruh peserta didik telah berpartisipasi dalam PEMILU 2024. Hal tersebut terjadi dikarenakan madrasah melakukan

kerjasama dengan pihak Dukcapil kecamatan pleret dalam pembuatan KTP. Dari kegiatan tersebut, seluruh peserta didik dapat didata dan dicatat dalam pembuatan ktp dan dapat mengikuti kegiatan PEMILU 2024.

Sehingga dapat dikatakan pendidikan politik dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik peserta didik melalui pembiasaan atau habituasi dalam kegiatan politik. Dengan adanya pendidikan politik di lembaga sekolah dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait lembaga-lembaga politik, terkait hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, dan lain sebagainya. Pendidikan politik yang diberikan dapat melalui kegiatan intrakurikuler yaitu pendidikan Pancasila dalam mata pelajaran dan ekstrakurikuler sekolah seperti Organisasi Siswa Intra Madrasah, podcast, dan ekstrakurikuler lainnya melalui pendekatan dan metode yang menarik untuk menjadikan peserta didik selaku remaja penerus generasi bangsa dapat lebih paham dan “melek” politik.

## 2. Pendidikan Politik berperan dalam pelajaran di MAN 3 Bantul

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan aspek pendidikan politik yang memiliki fokus pada peranan warga negara yang disesuaikan dalam peranannya pada ketentuan Pancasila dan Undang-undang supaya terbentuk warga negara yang dapat diandalkan (Cholisin.2024,p.10). Adapun Menurut (Somantri, 1976.p.54). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik terfokus pada pemahaman demokrasi yang diberikan melalui berbagai sumber literasi, positif influence, orang tua, masyarakat yang digunakan untuk melatih kecerdasan berpikir kritis, analisis, bersikap dan bertindak secara demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila yang diberikan di MAN 3 Bantul melalui 6 pendekatan yaitu pemahaman mengenai demokrasi, pembiasaan karakter, diskusi mengenai isu-isu yang sedang terjadi, relevansi dan urgensi diskusi, pengembangan keterampilan berpikir kritis, partisipasi aktif dalam pembelajaran. Lestari (2017) mengemukakan bahwa pendidikan politik memiliki tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pemahaman demokrasi yang diberikan oleh MAN 3 Bantul melalui Pendidikan Pancasila masuk ke dalam aspek kognitif dimana peserta didik akan diberikan pengetahuan dan pemahaman politik yang meliputi demokrasi, hak warga negara, kedaulatan rakyat, sistem kelembangaan negara. Adapun aspek afektif yang dilakukan madrasah melalui penanaman nilai-nilai kepada peserta didik untuk membentuk karakter yang dapat mengimplementasikan nilai-nilai politik dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, guru pendidikan Pancasila selalu menyelipkan sikap karakter kepada peserta didik seperti nilai-nilai kemandirian, toleransi, nilai demokrasi, rasa tanggungjawab, dan lain sebagainya.

Lestari ( 2017.p.134) mengemukakan bahwa pembelajaran politik dapat dilakukan dengan mata pelajaran tertentu seperti mata pelajaran pendidikan kebangsaan dan sejarah. Dan upaya MAN 3 Bantul untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam mengatasi gejala kelesuan partisipasi politik melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila yaitu:

### a. Integrasi Pendidikan Pancasila melalui pendekatan interaktif

Pendidikan Pancasila yang dilakukan dengan pendekatan yang interaktif dan relevan dapat meningkatkan partisipasi politik peserta didik sebagai pemilih pemula. Guru pendidikan Pancasila di madrasah menyampaikan materi dengan cara yang menarik, menyenangkan, dan disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari dan menggunakan metode pembelajaran seperti simulasi, diskusi, games edukatif, dan penggunaan teknologi. Dan berdasarkan hasil observasi, penggunaan teknologi cenderung membuat siswa jauh lebih interaktif dan dapat memahami materi dengan baik dan benar. Berdasarkan riset yang dikutip dari Databoks.co.id pada Selasa (19/3/2024) oleh IDN Research Institut bersama Advisia dalam laporan Indonesia Gen Z Repost 2024 juga menunjukkan hasil dimana terdapat 73% responden gen z yang menjadikan media sosial sebagai acuan utama dalam mencari informasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan alat komunikasi dalam pembelajaran merupakan pendekatan cenderung lebih menarik jika dibandingkan dengan pendekatan lainnya.

b. Menghubungkan materi dengan isu-isu aktual

Ruslan (2000.p.96) dalam (Lumanjara, 2020) menyampaikan beberapa cara untuk mencapai kesadaran politik, yaitu kesadaran politik yang lahir melalui dialog-dialog dan diskusi mengenai politik. Penyampaian materi politik melalui Pendidikan Pancasila di madrasah dikaitkan dengan isu-isu aktual yang sedang terjadi. Dengan berdiskusi mengenai isu-isu aktual seperti isu politik, lingkungan, teknologi, hak asasi manusia, dan lain sebagainya dapat menjadi jembatan untuk peserta didik dapat melatih sikap kritis dan meningkatkan kesadaran politik yang dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sejalan dengan Khoiron dalam (Lestari, 2017.p.32) dimana metode yang dapat digunakan dalam pendidikan politik yaitu dengan memunculkan gagasan (brainstorming) secara mendadak kemudian didiskusikan, kemudian melalui studi kasus membahas mengenai suatu permasalahan dalam masyarakat yang nantinya akan didiskusikan oleh peserta didik. Dimana tujuan dan fungsi politik menurut Amril dalam (Nasiwan, 2023.p.15) yaitu mampu mengadakan analisis/diskusi mengenai konflik-konflik yang aktual dan memiliki usaha yang untuk menyelesaikannya.

c. Melatih keterampilan analisis kritis

Sejalan dengan tujuan dan fungsi politik yang dikemukakan amril dalam (Nasiwan, 2023.p.15) yakni supaya seseorang memiliki wawasan kritis mengenai relasi-relasi politik yang ada disekitar lingkungannya dan memiliki kesadaran bahwa urusan-urusan struktur sosila yang ada di tengah masyarakat akan selalu berubah-berubah melalui perjuangan politik. Dalam melatih keterampilan kritis peserta didik, guru Pendidikan Pancasila MAN 3 Bantul memulai dengan menganalisis berita, permasalahan yang terjadi, dan argumen kritis dalam membuat keputusan politik. Dengan melatih keterampilan sikap kritis peserta didik merupakan langkah awal untuk membekali peserta didik sebagai pemilih pemula dalam memahami dan mengevaluasi informasi politik.

d. Kampanye pendidikan politik

Lestari (2017.p.135) mengemukakan pandangan peserta didik terhadap politik dapat dipengaruhi oleh tiga hal, salah satunya yaitu organisasi-organisasi sekolah, dimana kemampuan dan sensitifitas peserta didik tergantung pada banyak tindakan organisasi siswa serta tingkat kontribusi siswa didalamnya. Madrasah dalam melakkan kampanye pendidikan politik melalui pemilihan ketua OSIM, dimana hal tersebut merupakan langkah awal untuk mengajarkan kepada peserta didik terkait kampanye. Di MAN 3 Bantul, Organisasi Siswa Intra Madrasah merupakan organisasi yang digunakan untuk memupuk pengetahuan politik peserta didik karena melalui OSIM, peserta didik akan dilatih untuk membuat visi misi, debat pemilihan ketua, dan kampanye melalui sosial media dan datang ke setiap kelas. Selain itu, madrasah memiliki rencana dalam periode kedepan yaitu mengadakan sosialisasi kampanye dengan menggandeng pihak KPU Kabupaten Bantul yang nantinya akan diikuti oleh seluruh peserta didik untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi peserta didik dalam PEMILU.

Pachi (2019) dalam (Alfaruqy,2023) mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi keterlibatan politik pada generasi muda dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu faktor psikologis; faktor demografis; faktor sosial, dan faktor makro. Adapun kendala yang dihadapi oleh guru Pendidikan Pancasila dalam pemberian pendidikan politik kepada peserta didik yaitu adanya peserta didik pondok pesantren yang tidak membawa alat komunikasi dan memiliki perbedaan lingkungan. Guru pendidikan Pancasila merasa bahwa memilih pendekatan yang paling efektif dengan berbagai perbedaan background dan tidak membawanya akses komunikasi peserta didik. Kendala tersebut masuk ke dalam faktor psikologis dan faktor demografis, dimana peserta didik berada dalam lingkungan yang dapat menghambat perkembangan politik serta adanya pemikiran

bahwa mereka tidak mampu berpartisipasi politik dikarenakan kurangnya pemahaman politik yang dirasa. Namun untuk mengatasi hal tersebut, madrasah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan meningkatkan fasilitas dan sumber daya pendukung di lingkungan madrasah.

### 3. Hasil Penerapan Pendidikan Politik di MAN 3 Bantul dalam perspektif peserta didik pesantren dan non pesantren

Rasmuin (2023) bahwa pondok pesantren berbasis dalam segi formal untuk mengakomodir pendidikan politik melalui organisasi pondok dan kegiatan ceramah yang secara tidak langsung memberikan pengetahuan mengenai politik serta terdapat beberapa pondok pesantren yang menyediakan berbagai buku literasi yang memadai untuk menunjang pemahaman politik. Sehingga dalam pemberian pendidikan politik, pondok pesantren juga memiliki andil terhadap pemahaman dan partisipasi peserta didik. Adapun perspektif peserta didik adalah berikut.

#### a. Pendidikan politik

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah suatu jalur terencana untuk pengembangan peserta didik yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemandirian, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan masyarakat. Bangsa dan negara memiliki kemampuan untuk memulai proses pembelajaran. Di MAN 3 Bantul, setiap peserta didik akan diberikan pembelajaran spiritual agama yang disampaikan melalui kegiatan-kegiatan islam madrasah dan mata pelajaran islam. Kemudian keterampilan yang diperlukan di dalam diri, masyarakat, bangsa, dan bernegara madrasah juga menyampaikannya melalui pendidikan politik dengan membiasakan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam implementasi politik di madrasah yakni OSIM dan pelaksanaan berbagai diskusi yang membahas politik. Pendidikan politik di madrasah sudah berjalan dengan baik melalui berbagai kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Akan tetapi perlu ada inovasi yang dapat disesuaikan dengan kondisi generasi z sebagai pemilih pemula. Peserta didik selaku pemilih pemula terkadang kesulitan dalam menyaring informasi yang didapatkan melalui media sosial sehingga perlu pendekatan yang disesuaikan dengan peningkatan teknologi bagi peserta didik. Sesuai dengan (Sinamora, *et.al* 2024) yang mengemukakan bahwa generasi z sebagai social media influencer. Generasi ini dikenal aktif dan sensitif terhadap isu-isu sosial dan politik serta dianggap sebagai vokal dalam menyuarakan aspirasi masyarakat melalui hastag/tagar dan gerakan protes secara online. Jika pendidikan politik di madrasah dikembangkan dengan inovasi yang disesuaikan peserta didik sebagai gen z pastinya akan berpengaruh dalam pemahaman dan partisipasi peserta didik.

#### b. Kesadaran politik

Milbiath dalam (Budiardjo, 2008.p.194) mengemukakan bahwa kesadaran politik merupakan kemampuan warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik secara individu maupun kelompok. Di madrasah, kesadaran politik dalam pandangan peserta didik menjadi pengetahuan dan pemahaman mendasar yang harus dimiliki oleh peserta didik, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kesadaran politik peserta didik tidak hanya dari madrasah saja melainkan dapat melalui lingkungan dan keluarga. Kesadaran politik peserta didik di madrasah dicapai melalui arahan politik yang dilakukan di madrasah, pengalaman politik yang didapatkan dari partisipasi politik. hal tersebut sesuai dengan Ruslan (2000.p.96) dalam (Lumbanraja,2020) mengemukakan bahwa kesadaran politik dapat dicapai melalui (1) arahan politik secara langsung, (2) pengalaman politik yang didapatkan dari partisipasi politik, (3) kesadaran akan muncul melalui faktor individu, (4) kesadaran politik dapat lahir melalui dialog-dialog diskusi, dan (5) kesadaran politik dapat lahir melalui metode apprenticeship dan regenerasi. Peserta didik memiliki kesadaran akan partisipasinya dalam politik sebagai warga negara Indonesia, dan pada tahun ini peserta didik pesantren maupun non pesantren juga memberikan hak suaranya dalam PEMILU 2024. Menurut Samuel P.Huntington dalam (Suparto,

2021.p.14) terdapat partisipasi politik otonom dan partisipasi politik mobilisasi. Berdasarkan hasil penelitian di madrasah, peserta didik non pesantren cenderung termasuk seseorang yang berpartisipasi politik otonom dimana mereka memiliki kesadaran individu secara penuh tanpa adanya paksaan dan berdasarkan kemauan partisipasi secara mandiri. Akan tetapi, peserta didik pesantren cenderung tidak memiliki minat dalam perkembangan politik dikarenakan adanya kesibukan sehari-hari di lingkungan pondok dan fokus untuk belajar agama islam. Dan jika dikaitkan dengan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik menurut Milbrath dalam (Rafael, 2007) termasuk dalam situasi atau lingkungan politik, dimana peserta didik cenderung tidak memiliki minat dikarenakan lingkungan tempat tinggal yang tidak diperbolehkannya dalam mengakses alat komunikasi, dan fokus dalam kegiatan agama.

#### c. Pendukung dan penghambat

Faktor yang menjadi penghambat dalam pendidikan politik yang dirasakan oleh peserta didik pesantren yaitu tidak adanya alat komunikasi untuk mengakses berbagai informasi seputar politik dan isu-isu lainnya. Selain itu, terdapat beberapa pondok pesantren yang melarang santrinya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler non wajib, sehingga terdapat peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Kemudian kegiatan pondok yang sangat padat menjadi faktor juga dalam meningkatkan pemahaman politik melalui literasi buku, akan tetapi tidak jarang peserta didik juga melakukan berbagai diskusi di pondok pesantren terkait beberapa pelajaran di pondok dan demokrasi terkait pemilihan ketua pondok. Adapun dalam perspektif peserta didik non pesantren tidak memiliki kendala yang berarti dalam proses penerimaan pendidikan politik di madrasah. Mereka cenderung memiliki akses dalam mencari berbagai informasi melalui teknologi dan mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di madrasah.

### Simpulan

Proses habituasi efikasi politik peserta didik di MAN 3 Bantul dalam partisipasi peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian pendidikan politik berperan dalam pelajaran di MAN 3 Bantul melalui enam pendekatan diterapkan (1) pemahaman tentang demokrasi, (2) pembiasaan karakter, (3) diskusi mengenai isu-isu yang terjadi, (4) relevansi dan urgensi diskusi, (5) pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan (6) partisipasi aktif dalam pembelajaran. Selain itu, upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik serta mengatasi kelesuan partisipasi politik melalui Pendidikan Pancasila di MAN 3 Bantul yaitu dengan a) mengintegrasikan pendidikan Pancasila melalui pendekatan yang interaktif; b) menghubungkan materi dengan isu-isu aktual; c) melatih keterampilan analisis kritis; dan d) kampanye pendidikan politik. Adapun hasil penerapan pendidikan politik di Man 3 Bantul dalam perspektif peserta didik pesantren dan non pesantren dapat dilihat melalui aktifnya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler salah satunya adalah kegiatan OSIM yang setiap tahunnya mengalami kemajuan dan inovasi baik. Pada tahun ini madrasah juga menambahkan kampanye di setiap kelas dalam sesi pemilihan ketua OSIM. Peserta didik dapat memahami seputar demokrasi, lembaga-lembaga politik, alur pemilihan di TPS, dan permasalahan-permasalahan seputar pemilu yang telah dibahas oleh madrasah. Dan perbedaan perspektif dilihat dari 1) Pendidikan Politik; 2) Kesadaran politik; dan 3) Faktor pendukung dan penghambat.

### Referensi

- Alfaruqy, M. Z. (2023). Political Efficacy and Political Engagement in College Students. *Psikostudia: Jurnal Psikologi*, 12(2), 239-249.
- Bawaslu.go.id. (2023). "Bawaslu dan KPU Berkolaborasi dengan TikTok Indonesia Luncurkan Pusat Panduan Pemilu 2024". Retrived From <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-dan-kpu-berkolaborasi-dengan-tiktok-indonesia-luncurkan-pusat-panduan-pemilu-2024>.



- Beniman, B., Mursin, M., Ikbar, I., & LParisu, C. Z. (2022). Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2024. *Jurnal Sultra Elementary School*, 3(2), 70-82.
- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin, 2004. *Diklat Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Yogyakarta.
- Cholisin, 2005. *Pengembangan Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Dalam Praktik Pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi*.
- Crick, B. (2002). *Democracy: A very short introduction*. Oxford University Press Inc. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Databoks. (2023). "KPU: Pemilih Pemilu 2024 Didominasi oleh Kelompok Gen Z dan Milenial" Retrived From <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial>.
- Gaffar, J.M. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Konstitusi Press, 2013.
- Kartono, Kartini. 2009. *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Maran, R.R. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Rineka Cipta.
- Nasiwan. *Pendidikan Politik Transformatif: Kado Satu Abad Kemerdekaan Indonesia*. UNY Press, 2023.
- Simamora, I. Y., Nasution, A. A. M., Novita, D. D., Syahira, Z., Nazwa, W. S., & Siregar, R. A. (2024). Peran Generasi Z dalam Pemilu 2024 di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 5918-5922.
- Somantri, N. (1976). *Metode Mengajar Civics*. Jakarta: Erlangga.
- Teorell, J. (2006) Political participation and three theories of democracy: A research inventory and agenda. *European Journal of Political Research*, 45(5), 787-810
- Undang-undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional